

**PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL &  
MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS PERDAGANGAN,  
USAHA KECIL MENENGAH & KOPERASI KABUPATEN  
CIAMIS DI KECAMATAN KAWALI (STUDI KASUS DESA  
KAWALI & DESA KARANGPAWITAN)**

**Adhitya Arya Perdana**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : adhityaaryaperdana14@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi Pengembangan Kelompok Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah & Koperasi Kabupaten Ciamis Di Kecamatan Kawali yang belum optimal, hal tersebut terlihat dari terdapatnya masalah pada dimensi metode pelatihan, metode pendampingan, serta metode fasilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 (orang). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengembangan Kelompok UMKM Oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah & Koperasi Kabupaten Ciamis Di Kecamatan Kawali Ciamis belum optimal. Masih terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana dalam pengembangannya, seperti, kurangnya pelatihan atau workshop terkait pemahaman mengenai konsep kewirausahaan, belum adanya pendampingan oleh tenaga pendamping profesional terhadap kelompok UMKM, serta kelompok UMKM belum menerima bantuan fasilitas berupa barang/benda-benda dan uang (permodalan).*

**Kata Kunci :** *Pengembangan, UMKM, Dinas Perdagangan*

**PENDAHULUAN**

Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan

bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang

dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Karena potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Upaya demikian diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara kesempatan kerja yang rendah dan kebutuhan kerja yang tinggi. Di samping itu usaha industri kecil menengah mencerminkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Ciamis. Program pembangunan Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Ciamis diselaraskan dengan tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang pada hakekatnya bagaimana mendorong Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi mampu berkiprah secara mandiri yang didukung penuh oleh masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki untuk dikelola secara optimal. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Ciamis mempunyai kontribusi yang nyata terhadap perekonomian di Daerah yang pada gilirannya ditandai dengan meningkatnya tingkat pendapatan anggota dan masyarakat.

Pengembangan Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di Kabupaten Ciamis diarahkan agar gerakan Koperasi dan UMKM lebih meningkat fungsinya,

melalui konsolidasi semua aspek yang ada agar Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dapat tumbuh dan berkembang secara bertahap sesuai kemampuannya sendiri. Dinas Perdagangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di Kabupaten Ciamis perlu lebih berkokoh dan dimantapkan secara terus menerus melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang lebih intensif atau terpadu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan diarahkan agar dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan.

Pertanggung jawaban pembangunan dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yang disusun dalam penyampaian laporan diharapkan mampu memberikan rekomendasi lebih lanjut dengan memperluas serta mempertajam sasaran yang hendak dicapai melalui rencana strategis untuk membangun Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

Secara umum pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Ciamis, ditiap kecamatan memiliki perbedaan dalam melakukan upaya maupun tindakan dan alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan melalui tahapan pengembangan. Di Kecamatan Kawali pengembangan kelompok UMKM

masih harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. Kemudian belum optimalnya pengembangan yang dilakukan oleh Dinas terkait dalam upaya membantu mengembangkan kelompok UMKM yang ada di Kecamatan Kawali sehingga perlu adanya pengembangan secara lebih lanjut.

Hal ini menjadi tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sektor perindustrian yang berupaya untuk membantu mengembangkan industri kecil dan menengah agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Berkenaan dengan upaya pengembangan industri kecil dan menengah di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis perlu dilakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia, karena melalui pengembangan tersebut diharapkan berkembangnya usaha industri kecil dan menengah di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa Pengembangan Kelompok Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah & Koperasi Kabupaten Ciamis Di Kecamatan Kawali (Studi Kasus Desa Kawali & Desa Karangpawitan) belum optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kelompok UMKM belum menerima pelatihan atau workshop tentang pemahaman mengenai konsep kewirausahaan dalam mengembangkan usaha.
2. Belum adanya pendamping profesional terhadap kelompok UMKM. Sehingga tidak ada pengarahan dan pemahaman terhadap pengembangan usahanya.
3. Kelompok UMKM belum menerima adanya bantuan fasilitas berupa barang/benda-benda dan uang (permodalan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengembangan Kelompok Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah & Koperasi Kabupaten Ciamis Di Kecamatan Kawali (Studi Kasus Desa Kawali & Desa Karangpawitan)?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengembangan**

Menurut Abdurrohman (2021:208) mengatakan bahwa:

Pengembangan UMKM adalah peningkatan skala atau level usaha-usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar atau disebut UMKM naik kelas melalui peningkatan perluasan usaha, serta peningkatan kualitas dan

kuantitas dengan menggerakkan kapasitas.

Menurut (Hafsah, 2004:43) mengatakan bahwa:

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Ia juga menambahkan bahwa pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, diperlukan strategi pengembangan menurut Abdurrohman (2021:211):

- a. Metode Pelatihan,
- b. Metode Bimbingan dan Konseling,
- c. Metode Pendampingan,
- d. Metode Fasilitasi, dan
- e. Metode Mediasi.

## **2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Lambing (Abdurrohman, 2021:126) bahwa:

Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Entrepreneurship merupakan proses untuk

menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.

Adapun pengertian UKM menurut Suhardjono (Rafika, 2010:145) mengemukakan bahwa 'Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.'

Sedangkan menurut Tambunan (Abdurrohman, 2021:128) menyatakan bahwa:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan secara individu atau kelompok di semua bidang ekonomi. Pada dasarnya, yang membedakan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) yaitu dari segi aset awal, penghasilan rata-rata setiap tahunnya atau total pegawai tetap.

Menurut Danoko (2018:2) dalam upaya penumbuhan usaha kecil, perlu diketahui karakteristik serta permasalahan dan kendala yang dihadapi Oleh usaha kecil. Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum

2. Aspek legalitas usaha lemah
3. Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku.
4. Kebanyakan tidak memiliki laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.
5. Kualitas manajemen rendah dan jarang memiliki rencana usaha.
6. Sumber utama modal adalah modal pribadi
7. Sumber daya manusia (SDM) terbatas
8. Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

Pengembangan usaha menurut Abdurohim (2021:211) berdasarkan pengalaman di lapangan, metode pengembangan usaha khususnya UMKM dapat difokuskan pada aspek-aspek usaha, dengan pendekatan pelatihan, bimbingan teknik dan konseling, pendampingan, fasilitasi, dan mediasi. Untuk lebih jelasnya, berikut pendapat dari pendekatan metode pengembangan usaha tersebut melalui:

a. Metode Pelatihan

Menurut Widodo (Abdurohim, 2021:82) pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang

profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar.

b. Metode Bimbingan dan Konseling

Prayitno dan Anti (Abdurohim, 2021:82) mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Tujuannya adalah orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan lebih bersifat preventif (pencegahan) yaitu bantuan yang dilakukan untuk membantu individu dalam beradaptasi dan mencapai proses perkembangannya, baik secara pribadi, intelektual, sosial, emosi, dan karirnya.

Sedangkan Namora (Abdurohim, 2021:82) mengartikan konseling adalah keterampilan untuk membantu klien dapat membantu dirinya sendiri dalam memenuhi rasa aman, cinta, dapat mengambil keputusan dan aktualisasi. Mohammad Surya

- menyatakan bahwa konseling adalah suatu proses berorientasi belajar, dilakukan dalam suatu lingkungan sosial, antara seseorang dengan seseorang, di mana seorang konselor yang memiliki kemampuan profesional dalam bidang keterampilan dan pengetahuan psikologis berusaha membantu klien dengan metode yang cocok dengan kebutuhan klien tersebut dalam hubungannya dengan keseluruhan program ketenangan, supaya dapat mempelajari lebih baik tentang dirinya sendiri, belajar bagaimana memanfaatkan pemahaman tentang dirinya untuk realistis, sehingga klien dapat menjadi anggota masyarakat yang berbahagia dan lebih produktif.
- c. Metode Pendampingan  
Pendampingan terutama mengacu pada semangat, tindakan memedulikan, dan mendampingi secara generik. Adapun beberapa tujuan dari pendampingan adalah (1) berubah menuju pertumbuhan, (2) mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh, (3) belajar berkomunikasi yang lebih sehat, (4) berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat, (5) belajar mengungkap diri secara penuh dan utuh, (6) dapat bertahan, (7) menghilangkan gejala-gejala yang disfungsi (Abdurohim, 2021:82).
- d. Metode Fasilitasi  
Panggabean (Abdurohim, 2021:82) menyatakan bahwa fasilitasi dan fasilitator punya dimensi luas sekali, fasilitasi berasal dari kata *facilis* (Perancis) yang berarti “memudahkan”, sehingga fasilitator adalah aktor yang punya peran memudahkan. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang.
- e. Metode Mediasi  
Christopher (Abdurohim, 2021:82) mengemukakan bahwa: Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral, yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer adalah sebanyak 10 orang.

Pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui Bagaimana Pengembangan Kelompok Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah & Koperasi Kabupaten Ciamis Di Kecamatan Kawali (Studi Kasus Desa Kawali & Desa Karangpawitan) dapat ditinjau dari teori menurut Abdurrahim (2021:211) mengacu pada metode pengembangan usaha khususnya UMKM dapat difokuskan pada aspek-aspek usaha melalui: Metode Pelatihan, Metode Bimbingan dan Konseling, Metode Pendampingan, Metode Fasilitasi serta Metode Mediasi. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

### a. Metode Pelatihan

Salah satu upaya dalam pengembangan kelompok UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis di Desa Kawali dan Desa Karangpawitan yaitu melalui metode pelatihan. Hal ini dilihat dari adanya pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep kewirausahaan, dan adanya pelatihan usaha untuk meningkatkan keterampilan karyawan.

1) Adanya Pelatihan untuk Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Konsep Kewirausahaan

Penelitian dilapangan dapat dijelaskan bahwa pelatihan untuk Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep kewirausahaan belum optimal. Hal ini dilihat pada umumnya kelompok UMKM belum merasakan pelatihan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dan hanya dua kelompok pernah menerima pelatihan tersebut

Dengan demikian, Metode Pelatihan dimensi adanya pelatihan mengenai pemahaman UMKM belum optimal, berdasarkan sudut pandang peneliti pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum melaksanakan program tersebut. Secara teoritis, pengembangan menurut Abdurrahim (2021:208) merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis tetapi pada hasil penelitian diketahui sebagian besar informan belum mendapat pelatihan tersebut, ada juga yang menyebutkan hanya sekali, serta informasi mengenai program tersebut belum merata, ditunjang lagi minat dan antusias para pelaku UMKM yang kurang untuk mengikuti program pelatihan tersebut.

2) Adanya Pelatihan Usaha Untuk Meningkatkan Keterampilan Karyawan

Penelitian dilapangan dapat dijelaskan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan diketahui bahwa pelaksanaan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum pernah menerima bentuk

pelatihan apapun dalam upaya meningkatkan keterampilan karyawan, hanya satu kelompok UMKM yang mendapatkan pelatihan untuk pengembangan keterampilan tersebut.

Dengan demikian, metode pelatihan dimensi adanya pelatihan usaha untuk meningkatkan keterampilan karyawan belum optimal, berdasarkan sudut pandang peneliti pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum melaksanakan program tersebut. Secara teoritis, pelatihan menurut Widodo (2015:82) merupakan serangkaian aktivitas individu untuk meningkatkan keahlian tetapi pada hasil penelitian diketahui sebagian besar informan belum mendapat pelatihan tersebut, ada juga yang menyebutkan hanya sekali, serta informasi mengenai program tersebut belum merata, ditunjang lagi minat dan antusias para pelaku UMKM yang kurang untuk mengikuti program pelatihan tersebut.

#### **b. Metode Bimbingan dan Konseling**

Dalam proses pengembangan kelompok UMKM, perlu adanya keterlibatan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam sektor bimbingan dan konseling yang efektif dan massif. Hal tersebut karena dalam proses pengembangan, bimbingan secara langsung bisa menghasilkan sebuah simpul yang jelas. Akan paham betul mengenai kondisi pelaku usaha, perkembangan usaha dan menelaah

hambatan-hambatan dalam proses pengembangan kelompok usaha itu sendiri.

#### **1) Adanya Bimbingan Supaya Dapat Mempelajari Lebih Baik Tentang Dirinya Sendiri Guna Mengembangkan Kemampuan Dirinya Sendiri**

Penelitian dilapangan dapat dijelaskan adanya bimbingan supaya dapat mempelajari lebih baik tentang dirinya sendiri guna mengembangkan kemampuan dirinya sendiri diketahui bahwa pelaksanaan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari semua jawaban informan pada indikator - indikator yang dijadikan alat ukur penelitian. Pada indikator adanya adanya bimbingan supaya dapat mempelajari lebih baik tentang dirinya sendiri guna mengembangkan kemampuan dirinya sendiri belum optimal, semua informan mengatakan belum pernah menerima bimbingan dan konseling yang mempelajari tentang diri sendiri untuk mengembangkan kemampuan pribadi.

Dengan demikian, metode bimbingan dan konseling dimensi adanya bimbingan supaya dapat mempelajari lebih baik tentang dirinya sendiri guna mengembangkan kemampuan dirinya sendiri belum optimal, berdasarkan sudut pandang peneliti pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum melakukan bimbingan yang membantu para pelaku UMKM agar bisa mengetahui dirinya dan potensinya, tapi tidak dilaksanakan program secara formal yang cenderung



masyarakat atau para pelaku UMKM tidak paham akan hal tersebut.

2) Membantu Mendorong dan Mencapai Pengembangan Diri dan Rasa Percaya Diri Serta Menimbulkan Rasa Aman Terhadap Pelaku UMKM

Penelitian dilapangan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari semua jawaban informan pada indikator - indikator yang dijadikan alat ukur penelitian. Pada indikator membantu mendorong dan pengembangan diri, rasa percaya diri serta rasa aman terhadap pelaku UMKM belum optimal, pada umumnya kelompok UMKM belum merasakan bimbingan dan konseling dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

Dengan demikian, metode bimbingan dan konseling dimensi membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri serta menimbulkan rasa aman terhadap pelaku UMKM belum optimal, berdasarkan sudut pandang peneliti pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum melakukan hal tersebut dan dampaknya tidak begitu dirasakan oleh para pelaku UMKM di Desa Kawali dan Desa Karangpawitan yang memang cenderung mandiri.

**c. Metode Pendampingan**

Metode Pendampingan menurut Depton (2004:78) adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat

dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.

1) Adanya Pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional Terhadap Pelaku UMKM

Penelitian dilapangan dapat dijelaskan adanya pendampingan oleh tenaga professional terhadap pelaku UMKM diketahui bahwa pelaksanaan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar jawaban informan pada indicator-indikator yang dijadikan alat ukur penelitian. Pada indikator adanya pendampingan oleh tenaga profesional terhadap pelaku UMKM belum optimal. Diketahui bahwa pada umumnya kelompok UMKM belum merasakan pendampingan oleh tenaga profesional dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dan hana dua kelompok UMKM yang telah menerima pendampingan tersebut.

Dengan demikian, metode pendampingan dalam dimensi adanya pendampingan oleh tenaga professional terhadap pelaku UMKM belum optimal, berdasarkan sudut pandang peneliti pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis telah berupaya untuk menghadirkan tenaga profesional dalam melaksanakan pendampingan kelompok UMKM, seperti menghadirkan pendamping produk halal yang menjadi keinginan seluruh pelaku UMKM. Dari pandangan pelaku UMKM, kebanyakan tidak pernah

mendapatkan pendampingan oleh tenaga profesional tersebut.

- 2) Adanya pengarahan terhadap usaha dan memberikan penjelasan dalam pengembangan usahanya

Penelitian dilapangan dapat dijelaskan bahwa pendampingan dengan dimensi pengarahan terhadap usaha dan memberikan penjelasan dalam pengembangan usahanya diketahui bahwa pelaksanaan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar jawaban informan pada indikator - indikator yang dijadikan alat ukur penelitian. Pada indikator pengarahan terhadap usaha dan memberikan penjelasan dalam pengembangan usahanya belum optimal, pada umumnya kelompok UMKM belum mendapatkan pendampingan melalui pengarahan terhadap usahanya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dan hanya dua kelompok UMKM telah menerima pendampingan melalui pengarahan terhadap usahanya.

Dengan demikian, metode pendampingan dalam dimensi adanya pengarahan terhadap usaha dan memberikan penjelasan dalam pengembangan usahanya belum optimal, berdasarkan sudut pandang peneliti pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis telah berupaya untuk melakukan pengarahan dalam melaksanakan pendampingan kelompok UMKM, seperti

mengarahkan untuk untuk sertifikat halal produk menjadi keinginan seluruh pelaku UMKM. Dari pandangan pelaku UMKM, kebanyakan tidak pernah mendapatkan pendampingan melalui pengarahan terhadap usahanya tersebut.

#### **d. Metode Fasilitasi**

Menurut Drajat (2012:230) fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sejalan dengan pendapat Tjiptono (2014:317) fasilitas merupakan sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen. Untuk melakukan sebuah pengembangan, perlu adanya sebuah metode fasilitasi. Karena fasilitas merupakan penopang dalam sebuah pengembangan, apalagi dalam pengembangan kelompok UMKM yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

- 1) Adanya bantuan permodalan berupa uang untuk membantu pengembangan usaha

Penelitian dilapangan dapat dijelaskan bahwa pada umumnya kelompok UMKM belum merasakan fasilitas melalui bantuan permodalan berupa uang untuk pengembangan usaha dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, hanya tiga kelompok yang menerima bantuan proses pencairan bantuan dari Pemerintah Pusat oleh Dinas. Padahal modal dalam usaha memiliki peran vital dalam pengembangan usaha.

Dengan demikian, Metode Fasilitasi dengan dimensi adanya bantuan permodalan berupa uang untuk membantu pengembangan usaha belum optimal. Berdasarkan sudut pandang peneliti, pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum melaksanakan perannya dalam memfasilitasi kelompok UMKM melalui bantuan permodalan. Keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur dalam memenuhi bantuan permodalan perlu ditingkatkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Pihak Pemerintah Desa juga harus berkolaborasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis agar informasi bisa sampai kepada seluruh pelaku UMKM, karena banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan informasi dan akses mengenai pengajuan bantuan permodalan dari pemerintah.

2) Adanya bantuan fasilitas berupa benda-benda yang mendukung proses produksi

Penelitian dilapangan dapat dijelaskan adanya bantuan fasilitas berupa benda-benda yang mendukung dalam proses produksi diketahui bahwa pelaksanaan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari semua jawaban informan pada indikator - indikator yang dijadikan alat ukur penelitian. Pada indikator adanya bantuan fasilitas berupa benda-benda yang mendukung dalam proses produksi belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan pihak Dinas

Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum sama sekali memberikan program bantuan berupa pengadaan fasilitas berupa benda-benda yang mendukung produksi para pelaku UMKM. Itu dikarenakan belum memadainya anggaran yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

Dengan demikian, metode fasilitasi dalam indikator adanya bantuan fasilitas berupa benda-benda yang mendukung dalam proses produksi belum optimal. Berdasarkan sudut pandang peneliti, pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum memberikan fasilitas benda-benda untuk alat produksi kepada kelompok UMKM.

#### **e. Metode Mediasi**

Kegiatan bisnis atau usaha selalu diwarnai dengan adanya sengketa atau perselisihan antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Maka untuk penyelesaiannya perlu adanya sebuah metode mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditakutkannya berkepanjangan.

1) Adanya pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral untuk membantu pihak yang berselisih dalam menyelesaikan permasalahan

Penelitian dilapangan dapat dijelaskan adanya pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral untuk membantu pihak yang berselisih dalam menyelesaikan permasalahan diketahui

bahwa pelaksanaan belum optimal. Hal ini diketahui bahwa pada umumnya kelompok UMKM belum merasakan adanya pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral untuk membantu pihak yang berselisih dalam menyelesaikan permasalahan dari pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, karena tidak ada satu pun kelompok UMKM yang menerima mediasi dari pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan.

Dengan demikian, metode mediasi dengan indikator adanya pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral untuk membantu pihak yang berselisih tidak optimal dan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tidak terlalu berpengaruh. Dalam hal ini yang sering turun langsung sebagai pihak ketiga atau mediator adalah pihak pemerintah desa yang memang secara langsung bersentuhan dan lebih paham mengenai kondisi UMKM dan antropologi masyarakat yang ada di desanya masing-masing.

2) Adanya seseorang untuk membantu mencari alternatif dan penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka

Penelitian lapangan dapat dijelaskan adanya seseorang untuk membantu mencari alternatif dan penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka diketahui bahwa pelaksanaan belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan

pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis belum terjun langsung sebagai mediator ketika ada permasalahan yang terjadi antar pelaku UMKM dan menghadirkan seseorang untuk mencari alternatif agar kedua pihak yang berselisih tidak sama-sama diberatkan. Selain itu, kebanyakan yang hadir dalam penyelesaian masalah di pelaku UMKM adalah pihak Pemerintah Desa dengan langsung menghadirkan kepala desa untuk mencari alternatif dalam menyikapi masalah yang terjadi. Juga ada satu informan yang menghadirkan LSM ketika ada sebuah permasalahan yang di temukan untuk dicarikkannya alternatif jalan tengah secara kekeluargaan. Artinya, diketahui semua kelompok UMKM belum merasakan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam proses mediasi dengan menghadirkan seseorang untuk mencari alternatif dalam menyelesaikan masalah dan mengakomodasi kebutuhan mereka. Maka dalam indikator adanya seseorang untuk membantu mencari alternatif dan penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka dalam permasalahan pelaku UMKM di Kabupaten Ciamis adalah tidak terlibatnya pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam proses pencarian alternatif, tapi yang sering dilibatkan adalah pihak pemerintah desa dengan langsung menghadirkan Kepala Desa sebagai mediator untuk mencari alternatif dan

mengupayakan kepentingan bersama.

Dengan demikian, metode mediasi dengan indikator adanya seseorang untuk membantu mencari alternatif dan penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka tidak optimal dan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tidak terlalu berpengaruh. Dalam hal ini yang sering turun langsung sebagai seseorang pencari alternatif kepala desa yang memang secara langsung bersentuhan dan lebih paham mengenai kondisi UMKM dan antropologi masyarakat yang ada di desanya masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Pengembangan Kelompok Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah & Koperasi Kabupaten Ciamis Di Kecamatan Kawali (Studi Kasus Desa Kawali & Desa Karangpawitan) belum berjalan dengan optimal, hal ini dilihat dari jawaban informan per dimensi yang dijadikan alat ukur penelitian yaitu pada dimensi metode pelatihan, metode pendampingan serta metode fasilitasi. Pengembangan Kelompok Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah & Koperasi Kabupaten Ciamis Di Kecamatan Kawali masih adanya beberapa hambatan pada indikator yang belum efektif, seperti kurangnya minat para pelaku UMKM

untuk mengikuti kegiatan, minimnya informasi yang diberikan pihak pemerintah Desa kepada para pelaku UMKM dalam menyerap program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas, tidak pekanya pihak Dinas dalam mengoptimalkan bimbingan konseling, Dinas kurang memperdulikan peranan pemerintah dalam meningkatkan percaya diri dan memastikan rasa aman para pelaku UMKM, terbatasnya kemampuan pihak Dinas dalam menghadirkan tenaga profesional dan tidak sinergisnya pihak Dinas dengan pihak Desa dalam menginformasikan segala bentuk program yang ada, serta minimnya akses yang diterima oleh para kelompok UMKM terkait program pembinaan dan pengarahan untuk pengembangan kelompok UMKM. Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas maka upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Menengah & Koperasi Kabupaten Ciamis seperti mengadakan arahan kepada para ketua UMKM terkait manfaat pelatihan bimbingan dan pendampingan, mendorong minat para pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan pelatihan memahami konsep UMKM dan juga mendorong pihak Dinas Camat dan Pemerintah Desa untuk selalu massif dalam mengadakan program pelatihan mengenai pemahaman UMKM, penguatan sinergitas antara pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan pihak Kecamatan Kawali dan Pihak Desa, dirumuskan

kembali program bimbingan dan konseling melalui bimbingan dan pembinaan agar mampu berkembang membantu meningkatkan taraf ekonomi keluarga, serta melakukan penguatan sinergitas kelembagaan antara pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan pihak Pemerintah Desa agar tercipta hubungan komunikasi yang harmonis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurohim, Dindin, 2021, Pengembangan UMKM, Bandung: Refika Aditama.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Jakarta Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia
- Anoraga, P. (2007). Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Danoko. 2018. Strategi dan Praktek Bisnis Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Hafsah, M.J. 2004, Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Infokop Nomor 25 Tahun XX
- Tjiptono. 2014. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo.2015. Manajemen Pelatihan. Bandung: Pustaka Belajar.